

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM
UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAN HIDUP MASYARAKAT
(STUDI DESA LAHANG TENGAH KECAMATAN GAUNG KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



NURHADIJAH
NPM: 177310870

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum WR.WB

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa atas segala rahmat yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini dengan baik dan benar. Semoga ilmu yang penulis dapatkan selama masa perkuliahan bisa bermanfaat bagi penulis, keluarga serta masyarakat dan semoga di ridhoi Allah SWT. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqomah di jalan islam.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya atas dukungan serta bimbingan dari beberapa pihak selama proses studi dan juga penyusunan usulan penelitian ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi,SH,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Pemerintahan dan seluruh dosen yang mengajar Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Andriyus S.Sos.,M.Si selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu dan menyalurkan pengetahuan kepada penulis terutama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak dan Ibu Dosen jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Terimakasih kepada seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Fisipol yang telah membantu dalam pengurusan administrasi dari awal hingga akhir.
7. Terimakasih kepada kedua orang tua (mamak dan Abah) kakak dan abang yang selalu memberi do'a dan dorongan secara moril dan materil kepada penulis juga memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa serta tidak pernah lelah dan mengeluh untuk memperjuangkan nasib anak-anaknya agar menjadi orang yang lebih baik.
8. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan ilmu pemerintahan angkatan 2017 terkhusus sahabat-sahabatku Nadia Lestari, Widi Adesta yang selalu saling mensupport dan saling membantu penulis serta teman seperjuangan penulis Nova dan Sulis yang sampai saat ini masih bersama di perantauan saling membantu dalam menyelesaikan Tugas akhir kuliah ini.

9. Terimakasih kepada teman-teman penulis sahabat pergerakan PMII dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari Bahwa pada lembar tertentu dari naskah penelitian ini mungkin banyak ditemukan kesalahan dan kekurangan. Untuk memenuhi hal ini penulis berharap kemakluman dari para pembaca.

Akhirnya penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada para pembaca.

Wassalamualaikum WR.WB

Pekanbaru, 22 Maret 2021

Penulis

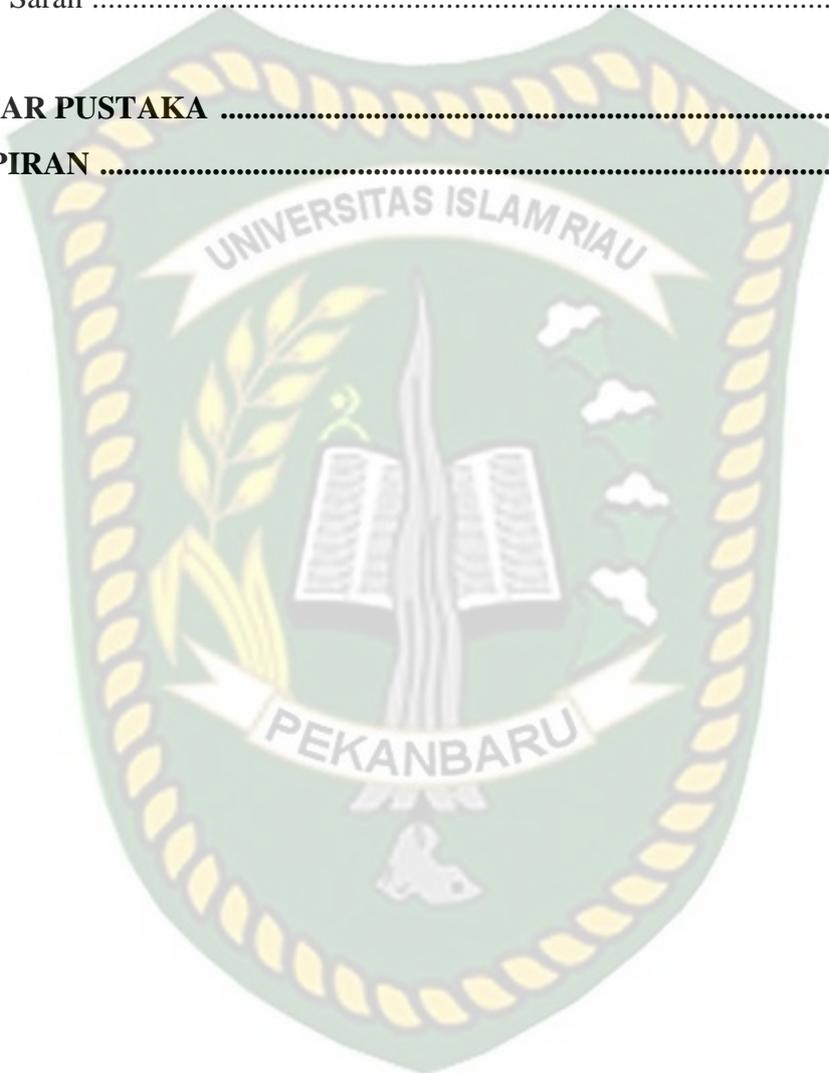
Nurhadijah

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PENELITIAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR GRAFIK	x
DAFTAR TABEL	xi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	19
a. Tujuan Penelitian	19
b. Kegunaan Penelitian.....	19
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	20
A. Studi Kepustakaan.....	20
1. Konsep Pemerintahan.....	20
2. Konsep Pemerintahan Daerah	24
3. Konsep Kebijakan	27
4. Konsep Evaluasi.....	30
5. Konsep Kesejahteraan.....	38
6. Konsep Kemiskinan	42
7. Konsep Program Keluarga harapan	50
B. Penelitian Terdahulu	53
C. Kerangka Pikir	56
D. Konsep Operasional	57
E. Operasional variabel.....	59

BAB III : METODE PENELITIAN.....	61
A. Tipe Penelitian	61
B. Lokasi Penelitian.....	62
C. Informan dan Key Informan	62
D. Teknik penarikan sampel	63
E. Jenis dan Sumber Data.....	63
F. Teknik pengumpulan data.....	64
G. Teknik Analisis Data.....	65
H. Jadwal kegiatan penelitian	66
I. Rencana sistematika laporan penelitian	67
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	69
A. Sejarah Singkat kabupaten indragiri Hilir.....	69
B. Profilt Kecamatan Gaung.....	72
C. Profil Desa Lahang Tengah.....	73
D. Gambaran Umum Pemerintahan Desa Lahang Tengah	78
BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN	81
A. Identitas Informan	81
1. Usia Informan	82
2. Jenis kelamin Informan	83
3. Tingkat Pendidikan informan	84
B. Hasil Penelitian	85
1. Efektivitas	87
2. Efisiensi	91
3. Kecukupan	94
4. Ketepatan	98
5. Responsivitas	102
6. Kesamaan	105
C. Hambatan Dalam proses Pelaksanaan Program PKH Di Desa Lahang Tengah Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir	108

BAB VI : PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN	116



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar

II.1 Kerangka Pikir Evaluasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Desa Lahang Tengah Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir).....	56
IV.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Lahang Tengah	80

DAFTAR GRAFIK

Grafik I.1 Daftar Nama Kecamatan Dan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kabupaten Indragiri Hili	14
Grafik I.2 Data Penerima Bantuan Social Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Gaung.....	16



DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Penelitian Terdahulu	53
Table II.2	Operasional Variabel.....	59
Table III.1	Jadal Waktu Kegiatan	66
Tabel IV.1	Luas Dan Persentase Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Indragiri Hilir	71
Tabel IV.2	Jumlah Penduduk Desa Lahang Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin	75
Tabel Iv.3	Jumlah Sarana Ibadah	76
Tabel Iv.4	Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Jenis Pekerjaan	77
Tabel V.1	Identitas Informan	81
Tabel V.2	Usia Informan	82
Tabel V.3	Jenis Kelamin Informan	83
Tabel V.4	Tingkat Pendidikan Informan	84

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Usulan Penelitian yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurhadijah
NPM : 177310870
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH)
Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat (Studi Desa Lahang Tengah Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya Ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwasaya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil Ujian Penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Maret 2021

Pernyataan,

Nurhadijah

**EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM UPAYA
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN HIDUP MASYARAKAT (STUDI
DESA LAHANG TENGAH KECAMATAN GAUNG KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR**

ABSTRAK

**Oleh :
Nurhadijah**

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengevaluasi pelaksanaan program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lahang Tengah Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan evaluasi kebijakan William N.Dunn. Adapun indikator dalam penelitian ini yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, ketepatan, responsivitas, dan kesamaan. Penelitian ini dilakukan di Desa Lahang Tengah Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan dilakukan dengan menggunakan purposive sampling yaitu cara penentuan informan ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu yaitu dengan melibatkan orang-orang tertentu. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lahang Tengah Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir belum terlaksana sesuai peraturan pemerintah hal ini disebabkan oleh beberapa faktor baik faktor internal dan faktor eksternal seperti kurangnya kejujuran peserta PKH dalam memberikan data kepada pemerintah, kurangnya SDM, kurangnya kerjasama dan kurangnya akses masyarakat mendapatkan informasi.

Kata Kunci : Evaluasi, Kesejahteraan, Kemiskinan, Program Keluarga Harapan

EVALUATION OF THE HARAPAN FAMILY PROGRAM (PKH) IN EFFORTS TO IMPROVE COMMUNITY LIFE (STUDY OF LAHANG TENGAH VILLAGE, KECAMATAN GAUNG, INDRAGIRI HILIR DISTRICT)

ABSTRACT

**By :
Nurhadijah**

The purpose of this study was to evaluate the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Lahang Tengah Village, Gaung District, Indragiri Hilir Regency. This research used a qualitative descriptive research method. The theory used in this research is by using William N. Dunn's policy evaluation. The indicators in this study are effectiveness, efficiency, adequacy, accuracy, responsiveness, and similarity. This research was conducted in Lahang Tengah Village, Gaung District, Indragiri Hilir Regency. The data collection techniques used were interviews, observation, and documentation. The technique of determining informants is carried out using purposive sampling, namely the method of determining the informants deliberately based on certain criteria or considerations, namely by involving certain people. Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Lahang Tengah Village, Gaung District, Indragiri Hilir Regency has not been implemented according to government regulations, this is due to several factors both internal and external factors such as the lack of honesty of PKH participants in providing data to the government, lack of human resources, lack of cooperation and lack of public access to information.

Keywords: Evaluation, Welfare, Poverty, Hope Family Program

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan di bentuknya Negara Republik Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk tercapainya tujuan negara Republik Indonesia maka disusunlah sistem pemerintahan rasional yang terdiri Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk kesejahteraan.

Dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsinya, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang. Untuk mewujudkan maksud pasal 18 tersebut maka ditetapkan UU NO 32 tahun

2004 dan sekarang di ganti dengan UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Dalam Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang pemerintaha daerah yang menekankan pada otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Otonomi yang nyata adalah kebebasan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlakukan secara tunbuh, hidup dan berkembang di daerah. Otonomi yang bertanggungjawab adalah berupa perwujudan petanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam bentuk wujud, tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan diberikannya otonomi tersebut, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, berkembangnya kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi, sejalan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka men jaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya Undang-Undang N0.13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir Miskin pada pasal 1 fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Indonesia merupakan negara yang memiliki tanah yang sangat luas, selain itu indonesia juga memiliki Sumber daya alam yang melimpah, namun pada kenyataannya indonesia tidak luput dari masalah kemiskinan. Tingginya angka

kemiskinan menggambarkan belum berhasilnya upaya-upaya pemerintah dalam melakukan pengentasan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat miskin. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan ada dua strategi utama yang harus ditempuh oleh pemerintah. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan pokok mereka. Kedua, memberdayakan mereka agar mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha dan mencegah terjadinya kemiskinan baru.

Masalah kemiskinan adalah masalah yang juga mengakibatkan gizi buruk dan anak-anak putus sekolah. Rendahnya kemampuan ekonomi sebuah keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) membawa dampak pada buruknya nutrisi dan gizi, serta menyebabkan banyak anak yang tidak dapat melanjutkan pelajarannya dibangku sekolah. Sebagian diantaranya harus bekerja keras membantu mencari nafkah untuk keluarganya dan ada yang terpaksa menjadi anak jalanan. Semakin besar jumlah anak usia anak sekolah yang tidak mampu memperoleh pendidikan yang layak akan memperburuk kondisi sosial, ekonomi, politik pada masa yang akan datang dan mengakibatkan beban sosial yang sangat tinggi terhadap negara.

Kebijakan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dinilai telah mengalami beberapa kekeliruan. Pertama, masih berorientasi pada aspek ekonomi daripada aspek multidimensional. Penanggulangan kemiskinan dengan fokus perhatian pada aspek ekonomi terbukti mengalami kegagalan, karena pengentasan kemiskinan yang direduksi dalam soal-soal ekonomi tidak akan mewakili persoalan kemiskinan yang sebenarnya. Kedua, lebih bernuansa kemurahan hati

produktivitas, padahal program penanggulangan kemiskinan seharusnya diarahkan supaya mereka menjadi produktif. Ketiga, memposisikan masyarakat miskin sebagai objek daripada subjek. Keempat, Pemerintah masih sebagai penguasa daripada fasilitator.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin pada pasal 28 dalam pelaksanaan penanganan fakir miskin pemerintah bertugas :

- a. Memberdayakan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin
- b. Memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan strategi penanganan fakir miskin
- c. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan strategi dalam penanganan fakir miskin
- d. Mengevaluasi kebijakan dan strategi penyelenggaraan penanganan fakir miskin
- e. Menyusun dan menyiadakan basis data fair miskin
- f. Mengalokasikan data yang memadai dan mencukupi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk penyelenggaraan penanganan fakir miskin.

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menanggulangi kemiskinan melalui berbagai program bantuan. Salah satunya yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan program bantuan bersyarat yang dinaungi oleh Kementrian Sosial. Program ini mulai dilaksanakan sejak tahun 2007, PKH

membuka akses kepada keluarga miskin terutama kepada ibu hamil dan anak balita maupun anak usia sekolah untuk memanfaatkan berbagai Fasilitas Layanan Kesehatan (faskes) dan layanan fasilitas pendidikan (fasdik) yang tersedia disekitar mereka. Manfaat PKH juga mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya.

Dalam pengertian PKH diatas disebutkan bahwa kriteria PKH itu ada 3 yaitu kriteria komponen pendidikan, kriteria komponen kesehatan, dan kriteria komponen kesejahteraan sosial.

1. Pendidikan

Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan pendidikan mengikuti kehadiran di satuan pendidikan/rumah singgah minimal 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung dengan catatan sebagai berikut:

- a. Peserta PKH yang memiliki anak usia 7-15 tahun diwajibkan untuk didaftarkan pada lembaga pendidikan dasar (SD/SMP/SMA) dan
- b. mengikuti kehadiran di kelas minimal 85% dari hari belajar efektif setiap bulan selama tahun ajaran berlangsung. Apabila ada anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah Dasar atau sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan.
- c. Bagi anak penyandang disabilitas yang masih mampu mengikuti pendidikan reguler dapat mengikuti program SD/MI atau SMP/MTs,

sedngkan bagi yang tidak mampu dapat mengikuti pendidikan non regular yaitu SDLB atau SMLB.

- d. Peserta PKH yang memiliki anak usia 15-18 tahun dan belum menyelesaikan pendidikan dasar, maka diwajibkan anak tersebut terdaftar/didaftarkan ke satuan pendidikan regular atau non regular (SD/MI atau SMP/MTs, atau paket A atau paket B).
- e. Anak peserta PKH yang bekerja atau menjadi pekerja anak atau telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka anak tersebut harus mengikuti program remedial, yakni memprsiapkannya kembakli ke satuan pendidikan. Program remedial ini adalah layanan rumah singgah atau shelter yang dilaksanakan kementerian Sosial untuk anak jalanan dan Kemenakertrans untuk pekerja anak.

2. Kesehatan

Kesehatan keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan. Keluarga Snagat Miskin (KSM) yang sudah ditetapkan menjadi peserta PKH dan memiliki kartu PKH diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protokol pelayanan sebagai berikut:

- a. Anak usia 0-6 tahun:
 - Bayi baru lahir harus mendapat IMD, pemeriksaan segera saat lahir, menjaga bayi sangat hangat, memberikan vitamin C, HBO, salep mata, dan konseling menyusui.
 - Anak usia 0-28 hari harus diperiksa kesehatannya sebanyak 3 kali.

- Anak usia 0-6 bulan harus diberikan ASI eksklusif
 - Anak usia 0-11 bulan harus diimunisasi lengkap dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.
 - Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan vitamin A minimal sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu bulan februari dan agustus.
 - Anak usia 12-59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.
 - Anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan untuk dipantau tumbuh kembangnya dan atau mengikuti program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) apabila di lokasi atay posyandu terdekat faslitas PAUD.
- b. Ibu hamil dan nifas:
- Selama kehamilan ibu hamil haraus melakukan pemriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 4)empat) kali, yaitu ssekali pada usia kehamilan sekali pada usia 0-3 bulan, sekali pada usia kehamilan 4-6 bulan, dua kali pada kehamilan 7-9 bulan, dan mendapatkan suplemen.
 - Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan
 - Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehatan dan mendapat pelayanan KB pasca persalinansetidaknya 3 kali minggu I, IV, dan VI setelah melahirkan.
- c. Anak dengan disabilitas, anak penyandang disabilitas dapat memeriksa kesehatan di dokter

d. spesialis atau psikolog sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan.

3. Kesejahteraan sosial

Kesejahteraan Sosial merupakan dimana seseorang merasa nyaman, tenteram, bahagia, serta dapat memnuhi kebutuhan hidupnya. Kriteria komponen kesejahteraan sosial dalam PKH ini ada 2 yaitu lanjut usia dan penyandang disabilitas.

- a. Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia mendefinisikan Lanjut usia merupakan seseorang yang telah berusia 60 tahun keatas. pada pasal 5 mengamanatkan bahwa lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Permasalahan yang dihadapi lanjut usia tidak saja diakibatkan perubahan fisik, mental, sosial dan psikologis serta ekonomi, namun juga disebabkan dalam memperoleh akses layanan fasilitas sosial dan ekonomi serta dalam pengisian waktu luang. Hal ini dapat menyebabkan menurunnya kemampuan dan umur harapan hidup manusia lanjut usia indonesia.

- b. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang

disabilitas berhak memperoleh pelayanan dan kemudahan yang berhubungan dengan pemenuhan hak terutama pengasuhan dan perawatan dari keluarganya.

Sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin dikarenakan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghalangan hak penyandang disabilitas. Untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi diperlukan bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas dalam mengakses pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Dari penjelasan di atas peneliti hanya memfokuskan 2 (dua) kriteria saja, yaitu kriteria komponen pendidikan dan kriteria komponen Kesehatan. Alasannya karena dari permasalahan yang terjadi hanya 2 kriteria tersebut yang menjadi masalah utama dalam penelitian ini, sedangkan untuk kesejahteraan sosial tidak ada KPM yang berhak menerima di kriteria komponen tersebut.

Dalam pelaksanaan PKH terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur proses program PKH tersebut, yaitu :

1. Koordinasi persiapan pertemuan awal, agar calon KPM PKH memiliki pemahaman tentang PKH dan kesiapan sebagai penerima manfaat, PKH, pendamping sosial PKH melakukan sosialisasi PKH pada pertemuan awal.
2. Distribusi formulir verifikasi, maksudnya adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data.

3. Validasi data, kegiatan validasi data dapat dilaksanakan pada calon KPM yang diundang dan hadir dalam pertemuan awal. Sedangkan calon KPM yang diundang tidak menghadiri pertemuan awal maka kegiatan validasi dapat dilakukan dengan cara pendampingan sosial PKH mengunjungi rumah calon KPM PKH. Calon KPM PKH menandatangani komitmen pada formulir validasi. Kegiatan validasi data dapat menggunakan aplikasi e-PKH dan/atau formulir validasi, penggunaannya diatur dalam petunjuk pelaksanaan formulir validasi.
4. Cetak formulir verifikasi, setelah melakukan validasi data peserta PKH di arahkan untuk mencetak formulir verifikasi data.
5. Pemutakhiran data rute status RTSM, pemutakhiran data bertujuan untuk memperoleh kondisi terkini anggota KPM PKH. Data tersebut digunakan sebagai data dasar program perlindungan sosial. Khusus PKH, data tersebut digunakan untuk verifikasi, penyaluran dan penghentian bantuan.
6. Pemutakhiran rutin data verifikasi, yang dimaksud dengan pemutakhiran data rutin adalah pembaharuan data peserta PKH yang dilakukan setiap saat dan terus menerus sesuai dengan kondisi terkini peserta PKH. Hasil pemutakhiran ini akan berpengaruh pada jumlah bantuan selain verifikasi.

Adapun mekanisme penerima bantuan PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sesuai dengan kriteria BPS dan memenuhi satu atau beberapa kriteria program yaitu memiliki ibu hamil/nifa, anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan SD, anak usia SD dan SLTP dan anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Sebagai bukti

kepersertaan PKH diberikan kartu peserta PKH atas nama ibu atau perempuan dewasa, kartu tersebut digunakan untuk menerima bantuan PKH. Selanjutnya kartu PKH dapat berfungsi sebagai kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) untuk seluruh keluarga penerima PKH tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam buku Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas 2009.

Penggunaan bantuan PKH ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, karenanya bantuan akan lebih efektif dan terarah, jika penerima bantuannya adalah ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan. Dalam kartu peserta PKH yang tercantum adalah nama ibu/wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga. Pengecualian dari ketentuan diatas dapat dilakukan pada kondisi tertentu, misalnya bila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga maka dapat digantikan oleh kepala keluarga. Kepesertaan PKH tidak menutup keikutsertaannya pada program-program pemerintah lainnya. Masyarakat yang menerima PKH sudah terintegrasi menerima Kartu keluarga Sejahtera (KKS), Karu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta menerima bantuan Beras Miskin (Raskin) ini dapat dilihat di Peraturan Menteri Sosial nomor 1 Tahun 2018 Tentang program Keluarga Harapan (PKH).

Misi besar PKH adalah untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Dalam jangka pendek, dana bantuan tunai bersyarat diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Dalam jangka panjang, merupakan investasi generasi masa depan yang lebih baik melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan. Sedangkan tujuan khusus PKH adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat (KPM) melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam megakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.

Kementerian Sosial Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan yaitu sebuah Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan pelaksanaan dari UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235). Perpres No. 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Ntahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 68, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5294). Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 86). Serta peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mkanisme penggunaan Data Terpadu Program penanganan fakir miskin (berita1 negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 705).

Berdasarkan keputusan menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan kriteria dan Pendataan fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, terdiri atas 14 kriteria kemiskinan.

14 kriteria kemiskinan menurut Kementrian Sosial Republik Indonesia, meliputi :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 M2 per orang
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah atau kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
6. Sumber air minum berasal udari sumur/mata air tidak terlindungi/sungai/air hujan
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu minggu sekali
9. Hanya membeli satu stel pjakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu.dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik
12. Sumber penghasilan rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan 500 M2, Buruh Tani, Nelayan, buruh Bangunan, Buruh Perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,-per bulan

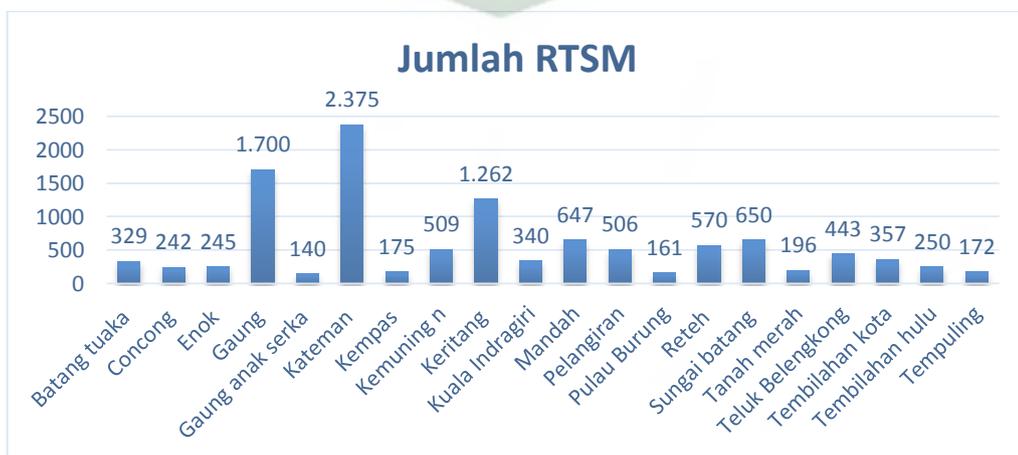
13. Pendidikan tinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah/tidak tamat SD/
tamat SD

14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp.
500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal
motor, atau barang modal lainnya

Dasar pelaksanaan PKH yaitu keputusan menteri Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat selaku ketua tim koordinasi penanggulangan kemiskinan,
No: 31/KEP/MENKO/KESRAt/IX/2007 tentang “Tim Pengendali Program
Keluarga Harapan”. Sedangkan PKH di daerah Kabupaten/Kota diatur oleh
Pejabat eselon II/Bupati bersama dengan Kepala dinas Sosial Kabupaten/Kota.

PKH dilaksanakan di Indonesia secara serentak pada tahun 2007. Namun
di Kabupaten Indragiri Hilir PKH ini baru dilaksanakan pada tahun 2014.
Pelaksanaan program tersebut dilaksanakan secara serentak untuk semua
kecamatan se kabupaten INHIL yang mana terdapat 20 kecamatan.

**Grafik 1.1 Daftar Nama Kecamatan dan Jumlah Keluarga Penerima
Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Indragiri Hilir**



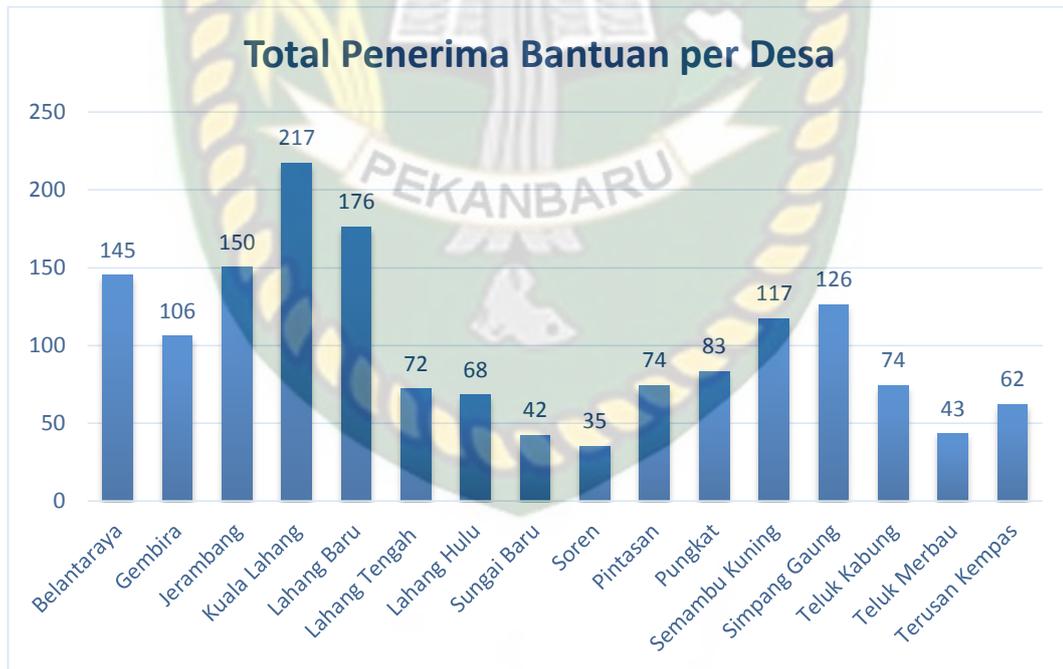
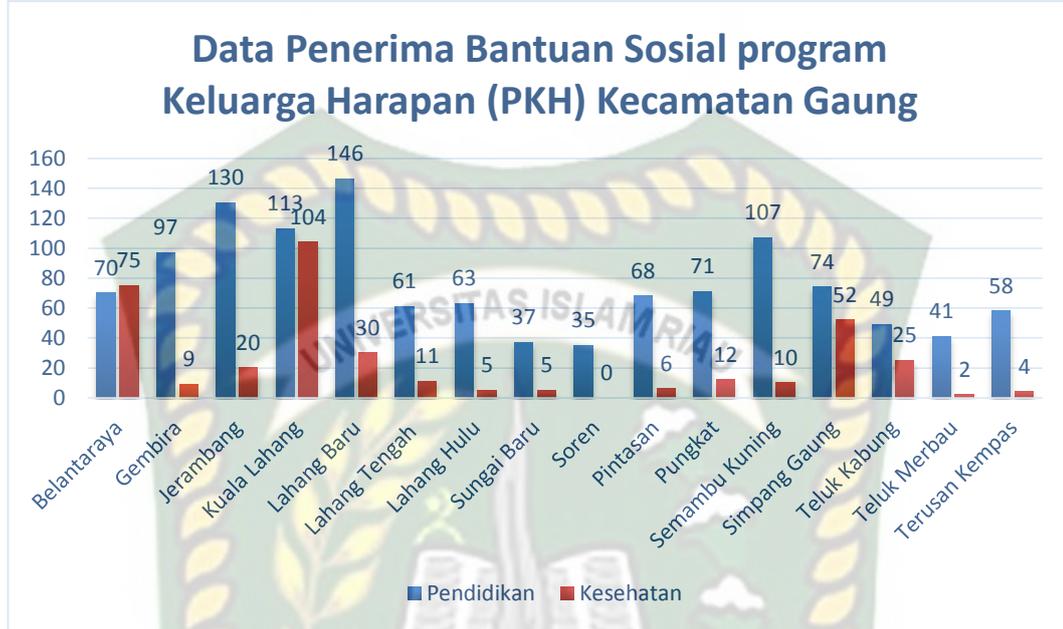
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan dari tabel diatas peneliti memilih Kecamatan Gaung khususnya di lingkungan kesejahteraan masyarakat tentunya tidak terlepas dari berbagai alasan. Adapun yang menjadi alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini adalah, pertama kecamatan gaung adalah kecamatan baru yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS), kedua masih banyaknya jumlah RTSM yang tidak menerima bantuan PKH. Dapat dilihat jumlah RTSM di kecamatan Gaung 1.700 sedangkan yang menerima bantuan PKH berjumlah 1.590 dan yang belum menerima PKH berjumlah 110 RTSM.

Sedangkan secara geografis peneliti memilih lokasi ini karena kecamatan Gaung merupakan kecamatan Pedalaman yang terpisah dengan pulau-pulau kecil dan selat dan jarak tempuh dari Kecamatan menuju kabupaten/kota juga cukup jauh yaitu 2 atau 3 jam perjalanan sungai. Dimana dengan lokasi demikian informasi tentang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sering terhambat.

Kecamatan Gaung merupakan Kecamatan yang melaksanakan program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dilaksanakan sejak tahun 2014 hingga sekarang. Kecamatan gaung terdiri dari 1 kelurahan dan 15 Desa, yaitu :

Grafik 1.2 Data Penerima Bantuan Sosial program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Gaung



Sumber Pendamping PKH Kecamatan Gaung November 2020

Dari tabel diatas peneliti memilih Desa Lahang Tengah karena di Desa tersebut ada masalah penelitian yang akan peneliti lakukan dan di lokasi tersebut masih terdapat beberapa masalah yang mengakibatkan PKH di Desa lahang

Tengah belum berhasil. Masalah yang pertama yaitu. Pertama terindikasi banyak RTSM yang belum menerima PKH. Kedua terindikasi penerima PKH kesehatan dan pendidikan tidak mengikuti program kegiatan yang diwajibkan seperti posyandu dan pendidikan dasar. Ketiga terindikasi ada penerima bantuan yang tidak menerima kriteria menurut peraturan pemerintah. Maksud hal tersebut adalah masih banyak masyarakat yang sangat bergantung pada bantuan yang diberikan pemerintah. Bahkan masih terdapat beberapa masyarakat yang sudah mampu juga menerima dan menikmati bantuan dari PKH.

Perlu kita ketahui bersama bahwa proses berakhirnya penerima bantuan PKH bisa melalui pembaharuan sosial ekonomi dan alamiah. Graduasi berdasarkan pembaharuan sosial ekonomi adalah masyarakat akan di graduasi karena telah mampu dan ekonomi telah meningkat. Sedangkan graduasi alamiah adalah masyarakat yang diputus masa kepesertaan PKH nya karena sudah memenuhi kriteria. Misalnya sudah tidak ada lagi anak yang sekolah dari SD-SMA dan tidak memiliki kriteria lain seperti ibu hamil, balita dan lansia.

Dari pemaparan masalah diatas dapat diketahui bahwa permasalahan pelaksanaan program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lahang Tengah adalah :

1. Terindikasi banyaknya Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang belum menerima PKH.

Jumlah RTSM di Desa Lahang Tengah berjumlah 266 kepala keluarga (KK) sedangkan yang menerima PKH hanya berjumlah 72 Kepala Keluarga (KK).

2. Terindikasi penerima PKH kesehatan/pendidikan tidak mengikuti program kegiatan yang diwajibkan seperti posyandu dan pendidikan dasar.

Di bidang kesehatan masih banyak orangtua/ibu hamil yang tidak memeriksakan kesehatannya, ini dilihat dari jumlah KPM bidang kesehatan berjumlah 11 yang rutin memeriksakan kesehatannya hanya 7 orang (sumber posyandu Desa Lahang tengah). Sedangkan di Bidang pendidikan yang menerima KPM berjumlah 61 tetapi yang mengikuti kriteria aturan pemerintah hanya berjumlah sekitar 30 KPM.

3. Terindikasi ada penerima bantuan yang tidak memenuhi kriteria menurut peraturan pemerintah.

Jumlah penerima PKH di Desa Lahang Tengah adalah 72 sedangkan yang di kategorikan mampu berjumlah 35 KPM. (sumber kepala Desa lahang tengah)

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk mengetahui, menganalisis, dan mendalami Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lahang Tengah dengan judul “Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat (Studi Desa Lahang Tengah Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dan fenomena yang telah dikemukakan diatas maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian yang diteliti adalah **“Bagaimana hasil Evaluasin Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat?”**.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengevaluasi pelaksanaan program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lahang tengah Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan PKH di Desa lahang Tengah Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis penulisan ini sebagai salah satu bahan pengembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu pemerintahan.
- b. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan sebagai salah satu bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya.
- c. Secara praktis sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya khususnya dalam penanganan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi pemerintah.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Sehubungan dengan permasalahan diatas, maka penulis akan mencoba memperjelas konsep berupa teori pada penelitian ini yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, agar dapat mempermudah penulis untuk memecahkan permasalahan dan menjadi landasan dalam penelitian ini.

1. Konsep Pemerintahan

Menurut David Apter dalam (syafi'i, 2013) Pemerintahan itu adalah merupakan satuan anggota yang paling umum yang memiliki : tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya itu adalah bagian dan monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan.

Menurut Soemendar (1985) pemerintahan sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah semestinya memerhatikan pula kentruman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi.(syafi'i, 2013)

Pengertian pemerintah dan pemerintahan terdiri dari dua konsep yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Pemerintah dalam arti luas yaitu mencakup semua alat kelembagaan negara yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau alat-alat kelengkapan negara yang bertindak atas nama negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit

yaitu aparatur / kelengkapan negara yang mempunyai tugas dan kewenangan kekuasaan eksekutif saja. (Sari,dkk,2020)

Menurut H. A. Brasz dalam (syafi'i, 2013) ilmu pemerintahan diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan di fungsikan secara baik ke dalam maupun keluar terhadap warganya. Sedangkan U. rosenthal mengemukakan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti sstudi tentang penunjukkan cara kerja ke dalam dan keluar struktur dan proses pemerintahan umum.

Menurut Woodrow Wilson (1924) dalam (syafi'i, 2013) pemerintah adalah akhir urainnya, adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud-maksud bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kelompok masyarakat.

Pemerintahan adalah sekelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan suatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (not to do) dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri. (Syafi'i, 2014:12)

Selanjutnya menurut Ndraha, 2002 (dalam Syafi'i, 2014) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan *civil* dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima pada saat dibutuhkan

oleh yang bersangkutan).

Secara substantif, menurut Rasyid (dalam Ndraha, 2005) makna pemerintahan: tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan, ada tiga (3) fungsi hakiki pemerintahan yaitu :

1. Pelayanan (service)
2. Pemberdayaan (empowerment)
3. Pembangunan (development)

Sedangkan menurut Sigiana (dalam Fitriani, 2018) apabila dikaitkan dengan pembangunan nasional maka pemerintah memiliki beberapa fungsi tertentu yaitu:

1. Pemerintah sebagai Stabilator, baik dalam menjaga stabilator politik, stabilator ekonomi maupun stabilator sosial budaya.
2. Pemerintah sebagai inovator baik dalam bidang administrasi negara/pemerintah, inovasi konsepsional dalam ide-ide mengenai pembangunan serta inovasi dalam sistem, prosedur tenaga kerja.
3. Pemerintah sebagai pelopor dalam berbagai aspek kehidupan bangsa.

Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang bertujuan untuk memimpin hidup bersama manusia ke arah kebahagiaan setinggi-tingginya, tanpa merugikan orang lain secara tidak sah (Van poilje: 1942). Secara harfiah, maka ilmu pemerintahan memang sejak awal dirancang untuk mengatur tata kerja dan hubungan antara pemerintah dan yang diperintah (rakyat) untuk mencapai tingkat kebahagiaan dan kemakmuran yang setinggi-tingginya, dengan berpedoman kepada aturan dan perundangan yang berlaku, sehingga pencapaian kebahagiaan tersebut terjadi

tanpa merugikan orang lain. (Zainal,2019)

Selanjutnya menurut Ndraha (dalam Labono, 2014:37) pemerintahan memiliki dua fungsi dasar yaitu :

1. Fungsi primer atau fungsi pelayanan yaitu fungsi pemerintahan sebagai provider jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan sipil dan layanan birokrasi.
2. Fungsi sekunder atau pemberdayaan sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi sendiri karena masih lemah dan tidak berdaya (powerles) termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.

Menurut Syafi'I (2013:12) Secara etimologi pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut :

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Terdiri dari dua unsur, rakyat dan pemerintah yang keduanya ada hubungannya.
2. Setelah ditambah awan "pe" menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi yang mengurus.
3. Setelah ditambah akhiran "an" menjadi pemerintahan, yang berarti perbuatan, cara atau perihal.

Dari pengertian pemerintahan sebagaimana dikemukakan diatas baik secara luas maupun sempit, menunjukkan bahwa baik yang diperintah maupun yang memerintah ada saling interaksi dalam memenuhi kebutuhan. Relasi dari keduanya kemudian memunculkan pemerintahan sebagai suatu kebutuhan.

Secara umum tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk

menjaga suatu sistem ketertiban umum warga masyarakat agar dapat menjalankan kehidupannya secara wajar.

Di dalam ilmu pemerintahan dimaksud dengan pemerintahan ini berkaitan dengan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan, jadi pemerintahan kabupaten/kota merupakan wujud nyata dari suatu organisasi formal yang berfungsi menjalankan fungsi pemerintahan secara umum dan melayani masyarakat. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat dikatakan sebagai penyelenggara birokrasi pemerintahan yang berada di kecamatan sedangkan pemerintah Kecamatan yang berada setingkat lebih tinggi dari pemerintahan kelurahan/desa.

Jadi ilmu pemerintahan adalah ilmu yang digunakan untuk mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, yudikasi dan eksekusi, dalam hubungan pusat dengan daerah, antar lembaga serta antara yang memerintah dengan diperintah secara baik dan benar dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan.

2. Konsep Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom. (Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah)

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah penyelenggaraan pemerintah Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setiap Pemerintah Daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis, Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, untuk Provinsi disebut wakil walikota, Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala Daerah juga memiliki kewajiban untuk memberikan laporan keterangan penanggung jawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang diselenggarakan berdasarkan kriteria urusan wajib dan urusan pilihan pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 14 yaitu :

1. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota yaitu :
 - a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
 - b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang

- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum
- e. Penanganan bidang kesehatan
- f. Penyelenggaraan pendidikan
- g. Penanggulangan masalah sosial
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan
- i. Fasilitas pembangunan koperasi, usaha kecil dan menengah
- j. Pengadilan lingkungan hidup
- k. Pelayanan pertahanan
- l. Pelayanan kependudukan dan sipil
- m. Pelayanan administrasi umum dan pemerintahan
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal
- o. Urusan lainnya yang diamankan oleh peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya pemerintah daerah dibentuk yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik guna agar mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik tingkat daerah. Untuk itu pembentukan daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya pertahanan dan keamanan serta pertimbangan dan syarat lainnya.

Selanjutnya dalam Undnag-Undang Nomor 32 tahun 2004 diatur tentang lembaga teknis daerah yaitu :

1. Lemmbaga teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala

daerah menyusun pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yang berbentuk Badan, Kantor atau Rumah sakit Umum Dearh.

2. Badan, Kantor, RSUD dipimpin oleh kepala badan, kepala kantor, kepala RSUD yang diangkat oleh kepala daerah Dari PNS yang memenuhi syarat berdasarkan UU No.32 Tahun 2004, DPRD yaitu :
 - a. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - b. DPRD memiliki fungsi Legilasi, anggaran dan pengawasan
 - c. Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota adalah merupakan daerah yang diberikan hak otonomi unntk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah.

Pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagai tujuan negara perlu melakukan upaya-upaya, diantaranya dengan mengeliarkan kebijakan-lebijakan unntk mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara sehingga tujuan negara dapat terwujud. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang berarti peraturan yang mengatur aspek-aspek kehidupan masyarakat negara diharap apa yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan negara dapat tercapai.

3. Konsep Kebijakan

Kata kebijakan secara etimologis berasal dari kata “*polis*”dalam bahasa

Yunani (*greek*) artinya “negara kota” . Dalam bahasa latin yaitu politik atau Negara. Bahasa inggris lama (*middle english*) dinilai *policie* yaitu berikaitan dengan unsur pemerintah atau administrasi pemerintah.

Sedangkan dalam bahasa indonesia kata “kebijaksanaan dan kebijakan” bijak atau bijaksana dalam bahasa Inggris “*wisdom*” asal katanya “*wisefi*”. Dari pengertian ini sifat kebijaksanaan itu bukan hanya sekedar pintar atau cerada (*smart*).

Menurut Duun (dalam Wahyu, 2020:17) mengemukakan proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang di lakukan didalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktifitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan digambarkan sebagai rangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

Di Indonesia menggunakan istilah “kebijaksanaan dan kebijakan” dari terjemahan *policy* yang dikaitkan dengan keputusan pemerintah. Hal ini diilhami oleh kata yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah, bertujuan untuk mengarahkan dan bertanggungjawab melayani umum. Pandangan ini disejalankan dengan pengertian *public* yang berarti pemerintah, masyarakat dan umum. Perbedaan antara kebijaksanaan dengan kebijakan, yang membedakan istilah *policy* sebagai keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat, dengan istilah “*disection*” yang diartikan keputusan bersifat kasuistis untuk satu hal.

Winaro dan Wahab sepakat mengatakan bahwa istilah “kebijakan” ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan grand design. (Raden Imam Al HAFis, 2015)

Menurut Titmuss (1974) dalam ((Raden Imam Al HAFis, 2015) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan menurut Titmuss, senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem-oriented*) dan beorientasi pada tindakan (*action-oriented*). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketepatan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Adapun tahapan-tahapan dalam proses pembuatan kebijakan diantaranya adalah :

1. Penyusunan, pada tahap ini para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik, banyak masalah tidak tersentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama.
2. Formulasi kebijakan, pada tahap ini para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya perintah eksekutif keputusan peradilan dan tindakan legislatif.
3. Adopsi kebijakan, pada tahap ini alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, kosensus diantara direktur lembaga dan keputusan peradilan.

4. Implementasi kebijakan, pada tahap ini kebijakan telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dari manusia.
5. Penilaian kebijakan, pada tahap ini unit-unit memeriksa dan akutansi dalam pemerintah menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif, dan peradilan memenuhi peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan. (Dunn, 2003)

Selanjutnya Dunn mengatakan kebijakan publik merupakan pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung. Termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

Kebijakan publik memiliki tujuan tertentu, berisi tindakan pemerintah, merupakan hal dan benar-benar dilakukan oleh pemerintah badan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan, bisa bersifat positif (tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu). Kebijakan dalam arti positif setidaknya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

4. Konsep Evaluasi Kebijakan

Evaluasi berasal dari bahasa Inggris “evaluation” kata tersebut diserap kedalam bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata aslinya dengan

sedikit penyesuaian lafal Indonesia menjadi “evaluasi”. Istilah kata penilaian merupakan kata benda dari nilai. Pengertian pengukuran mengacu pada kegiatan membandingkan sesuatu hal dengan satuan ukuran tertentu, sehingga sifatnya menjadi kuantitatif. Secara etimologi evaluasi artinya penilaian, sehingga mengevaluasi artinya memberikan penilaian atau nilai.

Evaluasi adalah mengidentifikasi keberhasilan atau kegagalan suatu rencana kegiatan atau program. Secara umum ada dua tipe evaluasi, yaitu evaluasi terus menerus (on-going evaluation) dan evaluasi akhir (expost evaluation). Tipe evaluasi yang pertama dilaksanakan pada internal periode waktu tertentu, misalnya per semester selama proses implementasi (biasanya pada akhir fase atau tahap suatu rencana). Tipe evaluasi yang kedua dilakukan setelah implementasi suatu program atau rencana. Evaluasi biasanya difokuskan pengidentifikasian kualitas program. Evaluasi berusaha mengidentifikasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada pelaksanaan atau penerapan suatu program. (Ranny Yulia, 2015)

Menurut Anderson (dalam Herman Susanto, 2016) evaluasi adalah sebuah menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Sedangkan menurut Stufflebeam (dalam Lababa 2008), Evaluasi adalah proses menggambarkan, memperoleh dan menggambarkan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.

Pemahaman mengenai pengertian evaluasi dapat berbeda-beda sesuai dengan pengertian evaluasi yang bervariasi oleh para pakar evaluasi. Menurut

Tague (dalam Hakim,2013) evaluasi bukan sekedar menilai suatu aktivitas secara spontan insidental, melainkan merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematis, dan terarah berdasarkan tujuan yang jelas.

Selanjutnya menurut Arikunto (dalam Hakim,2013) mengatakan evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan.

Menurut Ahmad (dalam Harbani,2012) mengatakan bahwa “evaluasi diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu (ketentuan, kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses, orang, obyek, dll) berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian”. Untuk menentukan nilai sesuatu dengan cara membandingkan dengan kriteria, evaluator dapat langsung membandingkan dengan kriteria namun dapat pula melakukan pengukuran terhadap sesuatu yang dievaluasi kemudian baru membandingkan dengan kriteria.

Menurut Crawford (dalam Harbani,2012) tujuan dan fungsi evaluasi adalah:

1. Untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan.
2. Untuk memberikan objektivitas pengamatan terhadap priaku hasil.
3. Untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan
4. Untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan

Menurut Komsiyah (dalam Burhanudin, 2018) Wiersma dan Jurs membedakan antara evaluasi, pengukuran, dan testing. Keduanya berpendapat bahwa evaluasi adalah suatu peoses yang mencakup pengukuran dan mungkin

juga testing, yang juga merupakan pengambilan keputusan tentang nilai. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Arikunto yang menyatakan bahwa evaluasi merupakan kegiatan mengukur dan menilai. Kedua pendapat ini secara implisit menyatakan bahwa evaluasi memiliki cakupan yang luas daripada pengukuran dan testing. Sedangkan menurut Casley dan Kumar (dalam Ranny Yulia, 2015) Evaluasi adalah suatu penilaian berkala terhadap relevansi, kinerja, efisiensi, dan dampak suatu proyek dikatakan dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, sementara Fink dan Kocekoff memberikan definisi evaluasi adalah merupakan serangkaian untuk menilai suatu program.

Selanjutnya menurut Subarsono (dalam Sisca Guswati) evaluasi kebijakan adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu kebijakan, untuk mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal, memenuhi aspek akuntabilitas public, menunjukkan pada stakeholders manfaat suatu kebijakan, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, sebaliknya dari hasil evaluasi diharapkan dapat ditetapkan kebijakan yang lebih baik.

Menurut Subarsono evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan, evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Beberapa evaluasi tersebut memiliki tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan
3. Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan
4. Mengukur dampak suatu kebijakan

5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan
6. Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang.

Terdapat beberapa alasan untuk menjawab mengapa perlu ada kegiatan evaluasi kebijakan, alasan tersebut dapat di klasifikasikan menjadi dua dimensi internal dan eksternal, yang bersifat internal antara lain :

1. Untuk mengetahui keberhasilan suatu kebijakan, dengan adanya evaluasi kebijakan dapat ditemukan informasi apakah suatu kebijakan mencapai tujuannya atau tidak.
2. Untuk mengetahui efektifitas kebijakan, kegiatan evaluasi kebijakan dapat mengemukakan penilaian apakah suatu kebijakan mencapai tujuannya atau tidak.
3. Untuk menjamin terhindarnya pengulangan kesalahan informasi yang memadai tentang nilai sebuah hasil kebijakan dengan sendirinya akan memberikan rambu agar tidak terulang kesalahan yang sama dalam implementasi yang serupa atau kebijakan yang lain pada masa-masa yang akan datang.

Sedangkan alasan yang bersifat eksternal paling tidak untuk dua kepentingan :

1. Untuk memenuhi prinsip akuntabilitas public, kegiatan penilaian terhadap kerja kebijakan yang telah diambil merupakan salah satu bentuk penanggungjawaban pengambil kebijakan kepada public, baik yang terkait secara langsung maupun dengan implementasi tindakan kebijakan.
2. Untuk mensosialisasikan manfaat sebuah kebijakan, dengan adanya kegiatan evaluasi kebijakan, masyarakat luas, khususnya kelompok

sasaran dan penerima, manfaat mengetahui manfaat kebijakan secara lebih teratur.

Grindle (dalam Jasri Daldi,2018) menyatakan tentang evaluasi program atau kebijakan dapat menjadi 3 tipe umum, yang masing-masing memiliki bentuk pertanyaan yang berbeda-beda walaupun pertanyaan tersebut bersifat berkelanjutan, yaitu : Pertama, evaluasi proses menanyakan persoalan “bagaimana program/kebijakan beroperasi?”, Kedua, evaluasi dampak menanyakan persoalan “apa yang dihasilkan oleh program/kebijakan?”, dan yang ketiga analisis strategi mencari jawaban atas persoalan “seberapa efektifkah program /kebijakan tersebut memecahkan masalah dibandingkan dengan kebijakan lainnya yang ditujukan pada masalah yang sama?”.

Dilihat dari pendapat Ndraha (dalam Jasri Daldi,2018) mengemukakan bahwa evaluasi adalah proses perbandingan antar standar dengan fakta analisisnya. Ada beberapa model evaluasi yang dikemukakan oleh Ndraha, diantaranya:

1. Model *before-after* yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan/perlakuan, Tolak ukur adalah kondisi before.
2. Model *das solen- das sein* yaitu perbandingan antara yang seharusnya dan yang senyatanya. Tolak ukurnya adalah *das solen*.
3. Model kelompok, kontrol tes yaitu perbandingan antara kelompok kontrol (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberi perlakuan). Tolak ukurnya adalah kelompok kontrol.

Seperti yang dikatakan Nurcholis (2005:169) menurutnya evaluasi

merupakan suatu proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketat tentang waktu. Dengan evaluasi dapat diketahui hambatan atau kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan. Dengan evaluasi dapat mengatur tingkat keberhasilan prinsip-prinsip dan pelaksanaannya.

Menurut Mustopadidjaja (dalam Jasri Daldi, 2018) teori evaluasi untuk perbaikan mengandung implikasi diperlukannya langkah berupa penilaian (judgement). Dengan kata lain, evaluasi dilakukan dalam rangka menilai tingkat efektifitas dari suatu kebijakan (policy effectiveness). Hasil evaluasi bermanfaat dalam rangka perbaikan terhadap rumusan kebijakan dan/atau implementasi kebijakan.

Menurut William N Dunn (dalam Sisca Guswati, 2016) evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment) untuk mengetahui sejauh mana pencapaian suatu kebijakan dan sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan.

Dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan digunakan kriteria-kriteria umum yang dimaksudkan untuk memberi arahan bagi evaluator, kriteria-kriteria yang dirumuskan akan dapat dijadikan sebagai salah satu patokan dalam menentukan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal.

William N Dunn (dalam Sisca Guswati, 2016) mengembangkan enam indikator atau kriteria evaluasi, yaitu sebagai berikut:

1. Efektivitas (effectiveness) berkenaan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas yang secara dekat berhubungan

dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter.

2. Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.
3. Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antar alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.
4. Ketepatan (appropriateness) adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan nasionalis substantive, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan suatu kriteria individu tetapi nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.
5. Responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya

diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

6. Kesamaan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjukkan pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada peraturan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya unit pelayanan atau manfaat monetr) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil di distribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan atau pelayanan publik kadang-kadang direkomendasikan atas dasar kriteria kesamaan. Kriteria kesamaan erat kaitannya dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan sumber dalam masyarakat.

5. Konsep Kesejahteraan

Kesejahteraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Penyusun Kamus, 1991) berasal dari kata “sejahtera” yang berarti aman, sentosa, dan makmur, sedangkan pengertian dari “kesejahteraan” itu sendiri adalah hal atau keadaan aman, damai, sentosa, selamat, kesenangan hidup, dan makmur.

Kesejahteraan dijelaskan dalam Undang-undang Kesejahteraan Sosial No. 11 Tahun 2009 pasal 1 yang berbunyi “Kesejahteraan sosial adalah kondisi tercukupinya keperluan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup dengan layak dan dapat mengembangkan kualitas diri, supaya dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Menurut Suryono (dalam Suhendi, 2013) bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu tatanan kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keamanan, kesopanan dan ketenangan lahir dan batin, yang membuat setiap warga Negara merasa nyaman untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan - kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial dengan sebaik-baiknya bagi diri sendiri, keluarga serta masyarakat serta menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila. Dan tercapainya kesejahteraan sosial ketika segala permasalahan sosial yang ada dapat ditangani, kebutuhan-kebutuhan dapat terpenuhi, dan kesempatan-kesempatan sosial dapat dimaksimalkan.

Menurut Rambe (2004), kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warganegara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.

Selanjutnya Menurut Sunarti (2012), Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.

Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatanyang diterima, namun tingkatan dari

kesejahteraan itu sendiri merupakan suatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut. (pramata, dkk 2012)

Menurut Liony (dalam Rita Kalinggi. 2018) kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial. Material maupun spritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi.

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi masyarakat yang berarti bahwa telah berada pada kondisi yang sejahtera. Pengertian sejahtera itu sendiri adalah kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan damai, sehingga untuk mencapai kondisi itu orang tersebut memerlukan suatu usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya. Para ahli ekonomi melihat kesejahteraan sebagai indikasi dari pendapatan individu (flow of income) dan daya beli (purchasing of power) masyarakat. (suwondo, 2015)

Menurut Suharto (dalam Suud, 2006) kesejahteraan sosial termasuk sebagai suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintahan untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tinjangan sosial.

Menurut Friedlander (dalam Suud, 2006) kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dimaksudkan untuk membangun individu-individu dan kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan dan hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk memprkembangkan seluruh keampuannya dan untuk meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Menurut Midgley (dalam Suud, 2006) menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan suatu keadaan sejahtera secara sosial tersusun dari tiga unsur sebagai berikut. Pertama, setinggi apa masalah-masalah sosial dikendalikan, kedua seluas apa kebutuhan-kebutuhan dipenuhi, dan terakhir setinggi apa kesempatan-kesempatan untuk maju tersedia. Tiga unsur itu berlaku bagi individu-individu, keluarga-keluarga, komunitas-komunitas dan bahkan seluruh masyarakat.

Menurut Imron (dalam Widy Astuti, 2012) kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial wargs negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsinya.

Terdapat beberapa indikator peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, di antaranya adalah :

1. Adanya kenaikan penghasilan secara kuantitatif
2. Adanya kesehatan keluarga yang lebih baik secara kualitatif

3. Adanya investasi ekonomis keluarga berupa tabungan

6. Konsep Kemiskinan

Kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.

Strategi pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui penguatan untuk memberdayakan dan kegiatan pemberdayaan. Masyarakat yang sangat miskin misalnya bekum bisa memenuhi kebutuhan makan sehari-hari dan kesehatan. Pada kelompok masyarakat ini diperlukan program-program pelayanan yang dapat meningkatkan kemampuan.

Menurut Siti (dalam Arif Citra Permana, dkk, 2018) Kemiskinan adalah kondisi dimana terjadi ketidak mampuan untuk mencukupi kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat terlihat dari banyak dimensi, dan untuk menggambarkan banyak dimensi kemiskinan digunakan istilah yang dikenal dengan “*plural poverty*”, yakni kurang mampunya masyarakat untuk mengakses segala kebutuhan dasar yang penting bagi dirinya.

Menurut Sudarwati (dalam Dedy Utomo, dkk, 2006) kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan pembangunan dan keterbelakangan kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada

kegiatan ekonomi tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. Dengan menggunakan perspektif yang lebih luas lagi, David Cox (dalam Dedy Utomo, Abdul Hakim, Heru Ribawanto, 2006) membagi kemiskinan kedalam beberapa yaitu kemiskinan yang diakibatkan globalisasi, kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan, kemiskinan sosial dan kemiskinan konsekuensial.

Menurut Piven dan Cloward (1993) dan Swanson (2001) dalam (Winano, 2013) mengemukakan bahwa kemiskinan berkaitan dengan tiga dimensi yang mencakup kekurangan materi, rendahnya penghasilan, dan adanya kebutuhan sosial. Kekurangan materi digambarkan sebagai situasi kesulitan yang dihadapi orang dalam memenuhi barang-barang kebutuhan pokok. Kemiskinan dalam dimensi ini sering dipahami sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar atau *basic needs*. Dimensi rendahnya penghasilan berkaitan dengan jumlah penghasilan yang sangat tidak memadai. Makna memadai dalam konteks kemiskinan atau poverty line yang berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya. Sementara itu dimensi sosial dapat dilihat sebagai kurangnya penataan publik, seperti kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya serta rendahnya akses terhadap layanan-layanan tersebut.

Di samping itu ada juga pengertian kemiskinan lain yang dikembangkan oleh Sajogyo. Ia mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu tingkat kehidupan yang berada dibawah standar kebutuhan hidup minimum yang diterapkan berdasarkan atas kebutuhan pokok pangan yang membuat orang cukup bekerja dan hidup sehat berdasarkan atas kebutuhan beras dan kebutuhan gizi.

Selanjutnya menurut Emil Salim (dalam Abdulsyani, 2012) kemiskinan lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Dikatakan berada dibawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok, seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.

David Cox (dalam Edi Suharto, 2014) membagi kemiskinan kedalam beberapa dimensi:

1. Kemiskinan yang diakibatkan oleh globalisasi. Globalisasi menghasilkan pemenang dan yang kalah. Pememngag umumnya adalah negara-negara maju, sedangkan negara-negara berkembang seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi.
2. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan subsistem (kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan), kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan percepatan pertumbuhan perkotaan).
3. Kemiskinan sosial. Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas.
4. Kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-

kejadian lain atau faktor-faktor eksternal diluar miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk.

Faktor kemiskinan atau mereka yang memiliki hidup dibawah garis kemiskinan menurut Emil salim (dalam Febri Pradana,2018) memiliki beberapa ciri yaitu :

1. Mereka umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah yang cukup, modal atau keterampilan karena faktor produksi yang dimiliki sedikit sekali sehingga kemampuan mereka memperoleh pendapatan sangat terbatas.
2. Mereka tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh produksi dengan kekuatan sendiri.
3. Tingkat pendidikan rendah (tidak tamat Sd)
4. Kebanyakan mereka tinggal di pedesaan
5. Banyak diantara merreka yang hidup di kota masih berusia muda dan tidak mempunyai keterampilan serta ppendidikan yang memadai.

Pada tahun 1973, WHO/FAO merekomendasikan tentang jumlah kalori dan protein untuk penduduk Indonesia yang besarnya masing-masing 1900 kalori dan 40 gram protein per oran per hari. Dan berdasarkan ukuran tersebut, sajogyo (dalam suyanto,2013) telah membuat suatu batasan atau klasifikasi kemiskinan sebagai berikut :

1. Untuk daerah perkotaan, seseorang disebut miskin apabila mengkonsumsi beras kurang dari 420 kilogram pertahunnya.
2. Untuk daerah pedesaan, seseorang disebut miskin apabila

mengonsumsi beras 320 kilogram, miskin sekali apabila mengonsumsi 240 kilogram dan paling miskin apabila mengonsumsi kurang dari 180 kilogram per tahunnya.

Dengan melihat banyaknya ukuran yang dapat dipakai untuk menentukan seseorang atau sekelompok orang untuk disebut miskin atau tidak miskin, maka umumnya para ahli akan merasa kesulitan dalam mengklasifikasikan masyarakat menurut garis kemiskinan. Namun, dari berbagai studi yang ada, pada dasarnya ada beberapa ciri-ciri kemiskinan, yaitu:

1. Mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal maupun keterampilan.
2. Mereka pada umumnya tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan yang diperoleh tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan ataupun modal usaha.
3. Tingkat pendidikan golongan miskin umumnya rendah, tidak sampai tamat sekolah.
4. Banyak diantara mereka yang tinggal didaerah pedesaan dan tidak mempunyai tanah garapan, walupun ada relatif kecil sekali.
5. Banyak diantara mereka yang hidup di kota masih berusia muda dan tidak mempunyai ketrampilan atau skill dan pendidikan. (Suyanto, 2013)

Kemiskinan merupakan salah satu bentuk problema yang muncul dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat di negara-negara berkembang

seperti Indonesia. Masalah kemiskinan ini menuntut adanya suatu upaya pemasalahan masalah secara terencana, terintegrasi dan menyeluruh dalam waktu yang singkat. Upaya pemecah masalah kemiskinan tersebut sebagai upaya untuk mempercepat proses pembangunan yang selama ini sedang diperjuangkan.

Menurut Hartono dan Aziz (2004: 329) terdapat beberapa faktor timbulnya kemiskinan yaitu:

1. Pendidikan yang terlampau rendah

Dengan adanya tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai ketrampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan teertentu yang dimiliki menyebabkan keterbatasan kemampuan untuk masuk kedalam dunia kerja. Atas dasar kenyataan diatas seseorang miskin karena tidak bisa berbuat apa-apa untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

2. Malas bekerja

Sikap malas merupakan suatu masalah yang cukupo memprihatinkan, kerana masalah ini menyangkut mentalitas dan kepribadian seseorang. Adanya sikap malas ini seseorang bersikap pasif dalam hidupnya (sikap bersandar pada nasib), sikap malas ini cenderung untuk menggantungkan hidupnya pada orang lain, baik pada keluarga, saudara atau family yang dipandang mempunyai kemampuan untuk menanggung kebutuhan mereka.

3. Keterbatasann sumber alam

Kemiskinan akan melanda suatu masyarakat apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Sering dikatakan oleh para ahli, bahwa masyarakat itu miskin karena memang dasarnya “alamiah miskin”. Alamiah miskin yang dimaksud disini adalah kekayaan alamnya, misalnya tanahnya berbatu-batu, tidak menyimpan kekayaan mineral dan sebagainya. dengan demikian layaklah kalau miskin sumber daya alam miskin juga masyarakatnya.

4. Terbatasnya lapangan kerja

Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal banyak orang mengatakan bahwa seseorang atau masyarakat harus mampu menciptakan lapangan kerja baru. tetapi secara faktual hal tersebut kecil kemungkinannya, karena adanya keterbatasan kemampuan seseorang baik yang berupa skill maupun modal.

5. Keterbatasan modal

Keterbatasan modal adalah sebuah kenyataan yang ada di negara-negara yang sedang berkembang, kenyataan tersenut membawa kemiskinan sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan ketrampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan. Keterbatasan modal bagi negara-negara yang sedang berkembang dapat diibaratkan sebagai suatu lingkaran yang tak berujung pangkal baik dari segi permintaan akan modal maupun dari segi penawaran akan modal.

6. Beban keluarga

Semakin banyak anggota keluarga semakin banyak atau semakin meningkat pada tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi. Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan sudah pasti akan menimbulkan kemiskinan karena mereka memang berangkat dari kemiskinan. Kenaikan pendapatan yang dibarengi dengan penambahan jumlah keluarga, berakibat kemiskinan akan tetap melanda dirinya dan bersifat laten.

Menurut Ellis (dalam Suahrto,2014) menyatakan bahwa kemiskinan menyangkut aspek ekonomi , politik dan sosial psikologis. Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang.

Dimensi kemiskinan secara sosial psikologis dapat diartikan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat. Faktor tersebut meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal datang dari dalam diri miskin itu sendiri, seperti rendahnya pendidikan atau adanya hambatan budaya. Hambatan budaya seperti malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja dan sebagainya. Faktor eksternal datang dari luar kemampuan orang yang bersangkutan, seperti birokrasi atau peraturan-peraturan resmi yang dapat menghambat seseorang dalam memanfaatkan sumbernya, seperti tidak tersedianya lapangan pekerjaan.

Menurut teori fungsional dari stratifikasi dengan tokohnya Davis (dalam Soelaeman, 1998) bahwa kemiskinan pun memiliki sejumlah fungsi yaitu:

1. Fungsi ekonomi

Penyediaan tenaga untuk pekerjaan tertentu, menimbulkan dana sosial, membuka lapangan kerja baru dan memanfaatkan barang bekas (masyarakat pemulung)

2. Fungsi sosial

Menimbulkan altruisme (kebaikan spontan) dan perasaan, sumber imajinasi kesulitan hidup bagi si kaya, sebagai ukuran kemajuan bagi kelas lain dan merangsang munculnya badan amal.

3. Fungsi kultural

Sumber inspirasi kebijaksanaan teknokrat dan sumber inspirasi sastra dan memperkaya budaya saling mengayomi antar sesama manusia.

4. Fungsi politik

Berfungsi sebagai kelompok gelisah atau masyarakat marginal untuk musuh bersaing bagi kelompok lain.

5. Konsep Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan. Kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. PKH berada di bawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik di Pusat maupun di daerah. Oleh sebab itu, akan segera dibentuk Tim Pengendali PKH dalam TKPK agar terjadi koordinasi dan sinergi yang baik.

PKH merupakan program lintas kemiskinan dan lembaga, karena aktor utamanya adalah dari Badan Penanggulangan Pembangunan Nasional, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Departemen Komunikasi Dan Informatika, Dan Badan Pusat Statistik. Untuk mensukseskan program tersebut maka dibantu oleh tim tenaga ahli PKH dan konsultan World Bank.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai peserta PKH. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Dalam istilah internasional dikenal dengan *Conditional Cash Transfers (CCT)*. (Rita Kalalinggi, 2018)

Menurut Purwanto (dalam Caktri Indra Gunawan, 2013), PKH merupakan pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu pesertanya dalam hal mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar.

Program Keluarga Harapan adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yaitu pendidikan dan kesehatan.

Sasaran atau penerima bantuan PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih. Penerima bantuan adalah

ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (jika tidak ada ibu maka nenek, tante/bibi, atau kakak perempuan dapat menjadi penerima bantuan). Jadi, pada kartu kepesertaan PKH pun akan tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga. Untuk itu, orang yang harus dan berhak mengambil pelayanan adalah orang yang namanya tercantum di kartu PKH.

Calon penerima terpilih harus menandatangani persetujuan bahwa selama mereka menerima bantuan, mereka akan :

1. Menyekolahkan anak 7-15 tahun serta anak usia 16-18 tahun namun belum selesai pendidikan dasar 9 tahun wajib.
2. Membawa anak usia 0-6 tahun ke fasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan bagi anak.
3. Untuk ibu hamil harus memeriksakan kesehatan diri dan janinnya kefasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan PKH bagi ibu hamil.

Dalam pengertian PKH jelas disebutkan bahwa komponen yang menjadi fokus utama adalah bidang kesehatan dan pendidikan. Tujuan utama PKH kesehatan adalah meningkatkan status kesehatan ibu dan anak Indonesia, khususnya bagi kelompok masyarakat sangat miskin, melalui pemberian insentif untuk melakukan kunjungan kesehatan yang bersifat preventif (pencegahan dan bukan pengobatan).

Komponen pendidikan dalam PKH dikembangkan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar wajib 9 tahun serta upaya mengurangi angka

pekerja anak pada keluarga yang sangat miskin. Anak penerima PKH pendidikan yang berusia 7-18 tahun dan belum menyelesaikan program pendidikan dasar 9 tahun harus mendaftarkan diri di sekolah formal atau non formal sereta hadir sekurang-kurangnya 85% waktu tatap muka.

Setiap anak peserta PKH berhak menerima bantuan selain PKH, baik itu program nasional maupun lokal. Bantuan PKH bukanlah pengganti program-program lainnya karenanya tidak cukup membantu pengeluaran lainnya seperti seragam, buku dan sebagainya. PKH merupakan bantuan agar orang tua dapat mengirim anak-anak ke sekolah.

Sebagai bukti kepesertaan PKH, KSM diberikan Kartu Peserta PKH. Uang bantuan dapat diambil oleh pengurus keluarga di akntor Pos terdekat dengan membawa Kartu Peserta PKH dan tidak dapat diwakilkan. Ssebagian peserta PKH menerima bantuan melalui rekening bank (BRI).

Hak peserta PKH adalah:

1. Menerima bantuan uang tunai
2. Menerima pelayanan kesehatan (ibu dan bayi) di puskesmas, posyandu, poliondes, dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku
3. Menerima pelayanan pendidikan bagi anak usia wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.I penelitian terdahulu tentang Program Keluarga Harapan (PKH)

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Herman Susanto	Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan	Sama-sama menggunakan metode kualitatif	Fenomena penelitian terdahulu masih banyak Rumah Tangga Sangat Miskin (PKH) yang ketergantungan dari bantuan PKH. Sementara fenomena penelitian ini masih banyak terdapat bantuan PKH yang tidak tepat sasaran
2	Jasri Daldi	Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Koto Kampar Kabupaten Kampar	Sama-sama meneliti tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	Penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif
3	Farida Umaroh Sri sutjiatmi	Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan	Fenomena penelitian sama- sama tentang tidak tepatnya sasaran bantuan Program Keluarga	Penelitian terdahulu efektivitas PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sementara penelitian

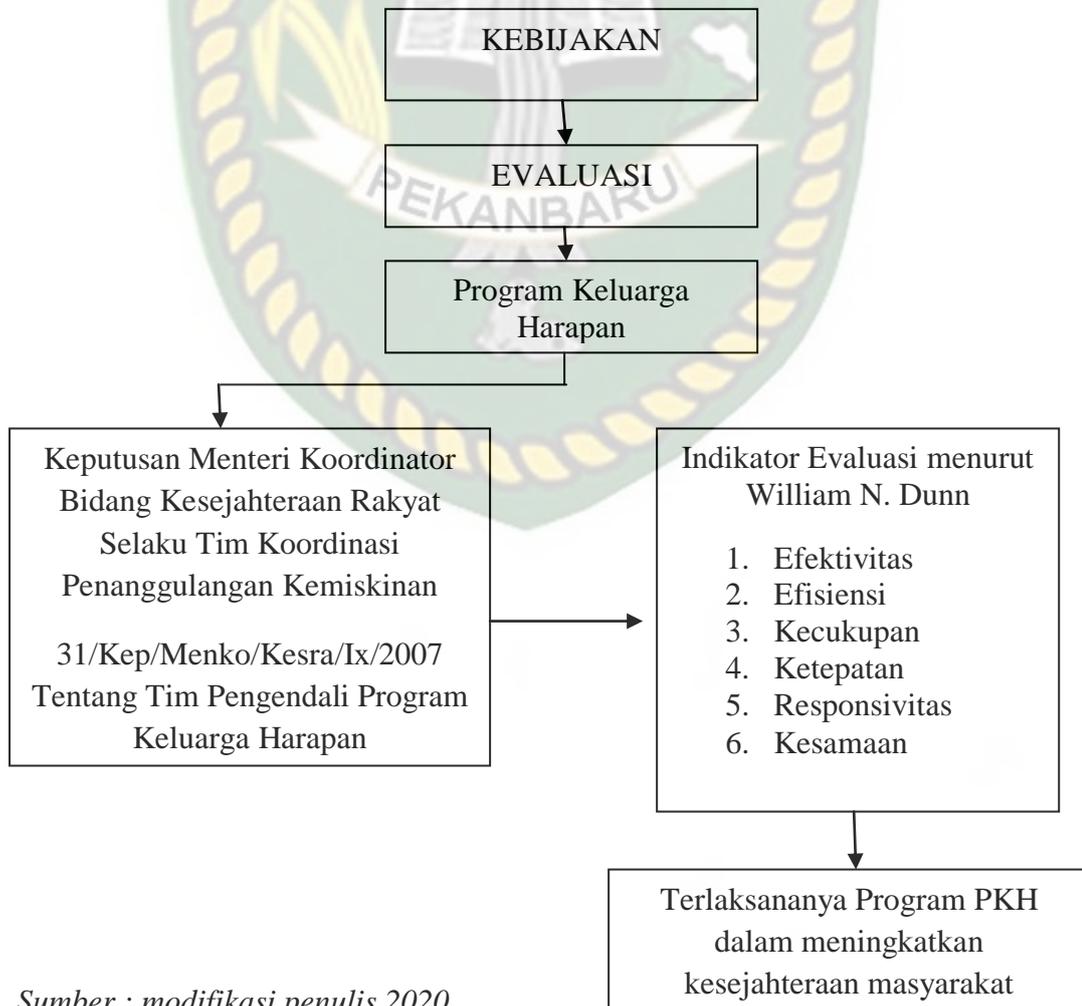
		Masyarakat Di Desa Kupu Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal	Harapan (PKH)	ini hanya terfokus ke evaluasi saja
4	Arif Citra Permana Cahyo Sasmito Cakti Indra Gunawan	Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Memutus Rantai Kemiskinan Di Kota Malang (Studi Di Kecamatan Lowok Waru Malang)	Sama-sama menggunakan metode kualitatif	Penelitian terdahulu menggunakan konsep implementasi, sementara penelitian ini menggunakan konsep evaluasi
5	Eduardus Edu Abd. Rohman	Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Batu	Sama-sama melakukan evaluasi terhadap Pelaksanaan PKH	Penelitian terdahulu dilaksanakan tahun 2019, sementara penelitian ini dilaksanakan tahun 2020

Dari penelitian diatas dapat dilihat persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tidak tepatnya sasaran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), sedangkan perbedaannya adalah terletak pada lokasi penelitian, waktu penelitian seerta tahun penilitian.

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan teori yang telah diuraikan dalam studi kepustakaan, maka penulis membuat kerangka pikiran penelitian ini, sebagai berikut :

Gambar II.II kerangka pikiran Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Desa Lahang Tengah Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir)



Sumber : modifikasi penulis 2020

D. Konsep Variabel

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis mengemukakan konsep-konsep yang dipakai diantaranya :

1. Pemerintahan adalah suatu organisasi atau tempat orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga tempat untuk mereka menjalankan aktivitas.
2. Evaluasi merupakan proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu.
3. Evaluasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan di Desa Lahang Tengah dimana disana masih terdapat tingginya angka kemiskinan dan masih perlu adanya perhatian dari instansi terkait.
4. Efektivitas adalah suatu kondisi yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas dan waktu, sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
5. Efisiensi adalah suatu ukuran keberhasilan suatu kegiatan yang diukur berdasarkan besarnya biaya atau sumber yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
6. Kecukupan adalah merupakan salah satu penting dalam penyelesaian masalah kebijakan.

7. Kesamaan/perataan yaitu apabila sebuah program tertentu mungkin dapat efektif, efisiensi dan cukup apabila biaya dan manfaatnya merata.
8. Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenal kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
9. Ketepatan merupakan suatu penialain terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah diberikan pemerintah atau organisasi, penilaian dengan cara mengevaluasi dampak kebijakan ditinjau dari aspek masyarakat sebagai sasaran kebijakan tersebut.
10. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.
11. Kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara didalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
12. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidak mampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal pendidikan, dan kesehatan.
13. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan perlindungan sosial melalui pemberian uang tunai kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM). Tujuannya yaitu untuk membantu keluarga sangat miskin menghindari kemiskinan dan memastikan generasi akan datang sehat dan bisa melanjutkan

pendidikan dasar (SD,SMP,SMA) agar tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah.

E. Operasional variabel

Operasional variabel merupakan bahasan penilaian yang telah ditentukan dalam penelitian ini yang mana didapatkan berdasarkan teori yang didapatkan pada studi kepustakaan, dalam penelitian ini operasional variabel disajikan dalam bentuk tabel, agar lebih memudahkan dalam menyusun uraian konsep variabel, yang mana terdiri dari indikator, ukuran skala dirancang untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.III Oeprasional Variabel Evaluasi Pelaksanaan PKH Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Desa Lahang Tengah Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir)

Konsep	Variabel	Indikator	Sub indikator
1	2	3	4
Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan suatu keputusan formal organisasi, yang mempunyai sifat yang mengikat, mengatur, perilaku dengan tujuan untuk dapat menciptakan tata nilai baru	Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	1. Efektivitas	a. Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat (KPM) melalui akses pendidikan dan kesehatan b. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan pendidikan dan

dalam masyarakat. (wiliam N. Dunn, 1999)			kesehatan
		2. Efisien	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan Sumber daya manusia b. Sumber daya waktu
		3. Kecukupan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengatasi masalah yang ada sebelum kebijakan diterapkan
		4. Ketepatan	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan bantuan sosial PKH kepada setiap masyarakat miskin b. menyesuaikan derngan data kondisi di lapangan
		5. Responsivitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Tanggapan tentang pelaksanaan program
		6. Kesamaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Program yang diberikan harus merata dan efisien b. Kebijakan yang dikeluarkan harus berdampak positif

Sumber : modifikasi penulis 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan dan sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

Dalam hal ini, peneliti kualitatif berusaha membangun makna tentang suatu fenomena berdasarkan pandangan-pandangan dari para partisipan. Hal ini berarti mengidentifikasi suatu komunitas *culture-sharing*, lalu meneliti bagaimana komunitas tersebut mengembangkan pola-pola perilaku yang berbeda dalam satu waktu (yaitu etnografi). Salah satu metode pengumpulan data untuk strategi semacam ini adalah dengan mengobservasi perilaku para partisipan dengan cara terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka. (Creswell, 2016)

Berdasarkan pemahaman metode penelitian kualitatif dari Creswell maka penelitian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat tepat menggunakan metode penelitian kualitatif.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Iahang Tengah Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. Alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan masih

banyak terdapat peserta PKH yang bukan tergolong masyarakat miskin tetapi menerima bantuan PKH tersebut dan penelitian ini di fokuskan pada pendidikan dan kesehatan yang ada di Desa Lahang Tengah Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir.

C. *Informan dan key informan*

Informan adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. *Informan* juga dikatakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Informan penelitian dalam penelitian ini penulis mengambil 5 (lima) orang yang terdiri dari Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir (Sulaiman, S.Pd), Koordinator Kabupaten PKH Indragiri Hilir (Ali Thamrin, ST), Pendamping PKH Kecamatan Gaung (Ayu Arridha, S.Pd), koordinator PKH Kabupaten dan Pendamping PKH ditetapkan oleh Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian sosial Republik Indonesia melalui Tes/seleksi untuk melakukan koordinator/pendampingan peserta PKH berdasarkan kontrak kerja dalam kurun waktu tertentu. Camat Gaung (H. Nurmansyah. AR, S.Sos), Kepala Desa Lahang Tengah (Arifin Ahmat), 3 peserta KPM yang menerima PKH.

Key informan adalah orang yang tidak hanya bisa memberi keterangan tentang sesuatu kepada peneliti, tetapi juga bisa memberi saran tentang sumber bukti yang mendukung serta menciptakan sesuatu terhadap sesuatu sumber yang

dibutuhkan. *Key informan* dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir (Drs. H. Syaifudin, MP).

D. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Perkembangan ini misalnya orang yang dianggap tahu tentang apa yang diharapkan.

Dalam penelitian ini, sebagaimana yang dijelaskan diatas bahwa penulis memilih informan dari orang-orang yang berkaitan langsung dalam penelitian ini adalah pemberi informasi yang diharapkan dapat menjawab pertanyaan dengan jelas dan lengkap.

E. Jenis dan Sumber Data

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis membagi kedalam dua bagian yaitu :

1. Data primer

Yaitu data atau keterangan yang diperoleh langsung dilapangan dari pihak pertama dalam hal ini responden terpilih sebagai sampel, yang didapatkan langsung dari sampel atau responden penelitian melalui wawancara dan observasi.

2. Data sekunder

Yaitu dari pihak yang berupa keterangan-keterangan yang relevan yang dapat menjadi objek penelitian ini yaitu :

- a. Keadaan geografis lokasi penelitian
- b. Struktur organisasi Dinas Sosial
- c. Peraturan Perundang-undangan
- d. Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis disini menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yaitu :

1. Observasi

Observasi kualitatif adalah ketika penulis langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Pada umumnya observasi ini bersifat *open0-ended* dimana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum kepada partisipan yang memungkinkan partisipan bebas memberikan pandangan-pandangan mereka. (Creswell, 2016)

2. Wawancara

Wawancara adalah peneliti dapat melakukan *face-to-face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam *focus grub interview* (wawancara

dalam kelompok tertentu) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan. (Creswell, 2016)

3. Dokumentasi

Dokumen ini bisa berupa dokumen publik misalnya koran, makalah, laporan kantor ataupun dokumen privat misalnya buku harian, surat, diari, dan e-mail. (Creswell, 2016)

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih yang mana pentingnya dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir terletak disebelah Timur Provinsi Riau atau pada bagian Timur pesisir Pulau Sumatera. Secara resmi terbentuk pada tanggal 14 Juli 1965 sesuai dengan tanggal ditanda tangannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965. Karena letak posisi Kabupaten Indragiri Hilir di Pantai Timur pesisir Pulau Sumatera, maka Kabupaten ini dapat dikategorikan sebagai daerah pantai. Panjang Garis pantai Kabupaten indragiri Hilir adalah 339.5 KM dan luas perairan laut meliputi 6.318 KM atau sekitar 54.43% dari luas wilayah. Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan bagian wilayah Provinsi Riau, memiliki luas wilayah 1.367.551 Ha, dengan jumlah pulau-pulau kecil sebanyak 25 pulau. Secara geografis terletak pada posisi 00 36`LU – 10 07` LS dan 104 10` - 102 32 BT. Adapun batas wilayah administrasi Kabupaten Indragiri Hilir adalah Sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Pelalawan
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten karimun dan Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau

Tabel IV.1 Luas dan Presentase Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir

No	Kecamatan	Luas (Has)	Presentase %
1	Keritang	94.642	6.92%
2	Reteh	53.183	3.89%
3	Enok	44.941	3.29%
4	Tanah merah	47.660	3.49%
5	Kuala indragiri	71.495	5.23%
6	Tembilahan	15.164	1.11%
7	Tembilahan Hulu	15.899	1.02%
8	Tempuling	75.287	5.51%
9	Batang Tuaka	39.118	2.86%
10	Gaung Anak Serka	64.995	4.75%
11	Gaung	207.617	15.18%
12	mandah	174.273	12.74%
13	Kateman	48.781	3.57%
14	Kemuning	104.984	7,68%
15	Pulau Burung	58.050	4,24%
16	Pelangiran	85.396	6,24%
17	Teluk Belengkong	42.774	3,13%
18	Concong	26.348	1,93%
19	Kempas	58.453	4,27%
20	Sungai Batang	40.489	2,96%
	Jumlah	1.367.551	100,00%

Sumber : RTRW Kabupaten Indragiri Hilir 2011-2031

B. Profil Kecamatan Gaung

Kecamatan Gaung ibukotanya Kuala Lahang merupakan salah satu dari 20 Kecamatan yang memiliki 16 Desa dan satu Kelurahan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan pemekaran dari kecamatan Gaung Anak Serka secara definitif sejak 5 Januari 1996.

Adapun asal mula kata Kelurahan Kuala Lahang berasal dari kata lalang yang dikarenakan disepanjang tepi sungai ditumbuhi rumput ilalang lebih kurang 500 M sehingga penduduk yang ada waktu itu memberi nama lalang.

Wilayah kecamatan Gaung berbatasan dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Mandah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Gaung Anak Serka, Tempulinng dan Kempas
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu
- Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Mandah dan Pelangiran

Kecamatan gaung mempunyai luas wilayah 1.021,74 KM² dan tinggi pusat wilayah Kecamatan Gaung dari permukaan laut adalah 3 s/d 4 meter. Ditepi-tepi sungai dan muara parit-parit banyak terdapat tumbuhan seperti pohon nipah, pidada, rasau dan berbagai tumbuhan rawa lainnya. Keadaan tanah sebagian besar terdiri dari tanah gambut, tanah liat dan endapan sungai serta rawa-rawa.

C. Profil Desa Lahang Tengah

Desa Lahang Tengah merupakan salah satu desa tertua diantara desa yang ada di Kecamatan Gaung, pada masa itu masih dikenal dengan kenegrian Lahang Tengah dan masih dalam wilayah Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS).

Setelah menjadi Desa Lahang Tengah dengan Kepala Desanya yang bernama Rusli bin Abdul jalil sebagai Kepala Desa Lahang Tengah, seiring berjalannya waktu berbagai perubahan pun banyak terjadi salah satunya untuk menjadi kepala Desa harus dilakukan pemilihan langsung oleh masyarakat desa tersebut demikian pula dengan Desa Lahang Tengah.

Pemilihan kepala desa pertama secara langsung oleh masyarakat dilaksanakan pada tahun 1962 pada masa itu kembali terpilih Rusli bin Abdul jalil untuk 1 periode. Sejak kepala desa dijabat oleh Rusli bin Abdul Jalil hingga tahun 2004 pemilihan kepala desa Lahang Tengah terus dimenangkan oleh Rusli Bin Abdul Jalil. Kemudian pada tahun 2009 berakhirilah jabatan Rusli bin Abdul Jalil, pemilihan kepala desa akan dilakukan kembali dan dikarenakan Rusli Bin Abdul Jalil tidak memubgkinkan untuk mencalonkan diri untuk menjadi kepala Desa maka berakhirilah masa kepemimpinan beliau. Pada tahun 2009 tersebut dilakukanlah pemelihan Kepala Desa dan terpilihlah Arifin Ahmat sebagai Kepala Desa Lahang Tengah. Arifin Ahmat dilantik pada tanggal 5 Februari 2010 dan beliau menjabat selama 2 periode hingga saat ini.

1. Batas Wilayah

Letak geografi Desa Lahang Tengah, secara geografis terletak dibagian Barat Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah lebih kurang $\pm 9 \text{ KM}^2$ dengan posisi $02^\circ \text{ LS} - 05^\circ \text{ BT}$ dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lahang Hulu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kelurahan Kuala Lahang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lahang Hulu
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Terusan Kempas

2. Luas Wilayah

- Tanah perkarangan permukiman rakyat : 7644 Ha
- Tanah perkebunan rakyat : 1200 Ha
- Tanah persawahan rakyat : 150 Ha
- Perairan : 2 Ha
- Sarana Sosial : 2 Ha
- Dan lain-lain : 2 Ha

3. Orbitrasi

Sedangkan jarak dengan pusat pemerintahan (orbitrasi) adalah sebagai berikut :

- Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan $\pm 4 \text{ Km}$
- Jarak dari Ibu kota Kabupaten $\pm 50 \text{ Km}$
- Jarak dari ibu kota provinsi $\pm 395 \text{ Km}$

4. Keadaan penduduk

Penduduk merupakan komponen yang berada dalam suatu wilayah daerah tertentu dan juga faktor yang dominan dalam suatu pembangunan di wilayah, termasuk sumber daya manusia maka pembangunan dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya pelaksanaan pembangunan bisa memberikan kesejahteraan masyarakat sehingga hasil pembangunan tersebut dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Dari data yang didapat dari monografi Desa Lahang Tengah Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Desa Lahang Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	628
2	Perempuan	656
Jumlah		1284

Sumber : kantor Desa Lahang Tengah, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Berarti terdapat perbedaan jumlah pertumbuhan penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Lahang Tengah.

5. keadaan Sosial

Dalam menjalankan kegiatan keagamaan perlu sarana dan prasarana, salah satunya yaitu tempat ibadah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.3 jumlah Sarana Ibadah

No	Sarana Ibadah	Agama	Jumlah
1	Masjid/Mushalla	Islam	2
2	Gereja	-	-
3	Pura	-	-
4	Wihara	-	-
Jumlah		1284	2

Sumber : Kantor Desa Lahang Tengah

Berdasarkan penjelasan diatas jumlah penduduk Desa Lahang Tengah berdasarkan agama islam sebanyak 1.284 jumlah penduduk sebanyak 1.284.

6. Keadaan Ekonomi

a. Mata Pencaharian

Mencari nafkah merupakan kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mata pencaharian masyarakat Desa Lahang Tengah Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir beranekaragam namun sebagian besar masyarakat bermata pencaharian petani. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.4 Jumlah Penduduk Desa Lahang Tengah Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)	Persentase Dari Jumlah Penduduk
1	Petani	601	45,91%
2	Buruh Tani	15	1,15%
3	Pedagang	43	3,28%
4	Peternak	2	0,15%
5	Serabutan	12	0,92%
6	Perabot	0	0%
7	PNS/TNI/POLRI	2	0,15%
8	Tenaga Horor	8	0,61%
9	Ibu Rumah Tangga	352	26,89%
10	Sopir	0	0%
11	Buruh Bangunan	3	0,23%
12	Nelayan	4	0,31%
13	Pertambangan	0	0%
14	Bengkel	4	0,31%
15	Belum Bekerja	32	2,44%
16	Tidak Bekerja	231	17,65%

Sumber : kantor Desa Lahang Tengah, 2021

D. Gambaran Umum Pemerintahan Desa Lahang Tengah

1. Lembaga pemerintahan

Jumlah aparat Desa

- Kepala Desa : 1
- Sekretaris Desa : 1
- Perangkat Desa : 11
- BPD : 5

2. Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan :

- LPM
- PKK
- Posyandu
- Pengajian
- Arisan
- Simpan pinjam
- Kelompok tani
- Karang taruna
- Ormas

3. Pembagian Wilayah

Nama Dusun :

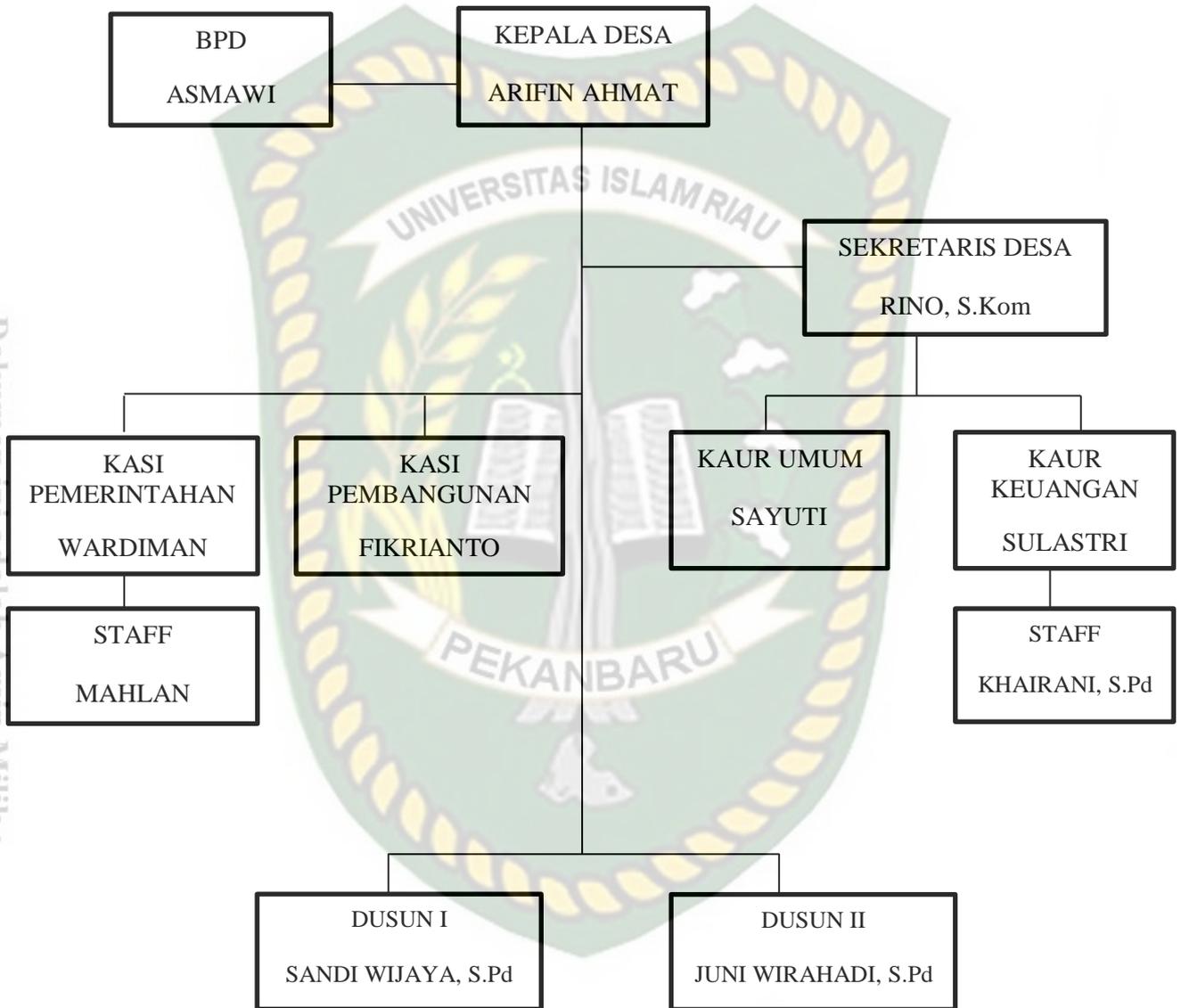
- Dusun I
- Dusun II

4. Struktur Organisasi

- Kepala Desa : Arifin Ahmat
- Sekretaris Desa : Rino, S.kom
- Kasi Pemerintahan : Wardiman
- Kasi pembangunan : Fikrianto
- Kaur Umum : Sayuti
- Kaur keuangan : Sulastri
- Kepala dusun I : Sandi Wijaya, S.Pd
- Kepala Dusun II : Juni wirahadi, S.Pd



**Gambar IV.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Lahang Tengah
Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir**



Sumber : Kantor Desa Lahang Tengah, 2021

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian baik dari observasi dan wawancara dengan informan mengenai Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat (Studi Desa Lahang Tengah Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir) maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lahang Tengah Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir pelaksanaan PKH masih kurang maksimal atau masih banyak terdapat penerima PKH yang tidak tepat sasaran dilihat dari indikator ketepatan. Pelaksanaan program PKH hambatannya yaitu Belum adanya kesadaran dari peserta PKH dalam mendukung program ini untuk memastikan bantuan tepat sasaran, seperti identitas peserta PKH pada waktu penyaluran bantuan, Kurangnya SDM dalam menjalankan pendampingan khususnya di Kecamatan Gaung, Kurang kerjasamanya antara pendamping PKH dengan pemerintahan Desa dalam menetapkan peserta PKH, Masih kurangnya akses untuk mendapat manfaat dari program-program baik itu pendidikan, kesehatan maupun program penanggulangan kemiskinan lainnya yang dapat membantu peserta PKH dalam proses pelaksanaan PKH.

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) masih kurangnya penelitian lapangan dalam pemilahan data, hal tersebutlah yang mengakibatkan ketidaktepatan dalam penetapan peserta PKH.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memiliki saran sebagai berikut :

1. Kepada para peserta PKH hendaknya memberikan data dan informasi yang benar agar program PKH ini dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
2. Hendaknya disetiap kecamatan menambah jumlah pendamping sesuai dengan jumlah Desa yang ada di kecamatan tersebut.
3. Kepada pendamping PKH khususnya pendamping Desa Lahang Tengah hendaknya lebih meningkatkan kerjasama kepada pemerintah Desa agar tidak ada kekeliruan dalam menetapkan peserta PKH.
4. Kepada pemerintah khususnya Dinas Sosial dan pendamping hendaknya sering melakukan sosialisasi agar peserta PKH tidak kurang dalam mendapatkan informasi mengenai akses mendapatkan bantuan PKH ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agussalim Andi Gadjon. 2007. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Ali, zaini, Imam raden. 2015. *Teori Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Marpoyan tujuh.
- Asikin, Zainal. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Creswell, J. W. 2017. *Research Design (pendekatan metod kualitatif, kuantitatif, dan Campuran)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Edi, Suharto. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial)*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Labolo, D.M. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT. Raja grafindo Persada
- Ndraha, T. 2015. *Kibernetologi (ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: PT. Renika Cipta.
- Ndraha Taliziduhu, 2005. *Teori Budaya Organisasi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Rambe, Adi. 2004. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung : Refika Aditama.

- Suud, Mohammad. 2006. *Orientasi Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Syafiie, Inu Kencana. 2007. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Mandar Maju.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Sistem pemerintahan indonesia*. Jakarta: rineka cipta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zulkifli, d. (2013). *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian (UP), Skripsi dan Kertas Kerja*. Pekanbaru: Badan Penerbit Fisipol UIR.

Jurnal

- Andira, Ayu, Burhanudin, and Rita Kalalinggi. 2018. “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Samarinda.” Kesmas, Jurnal Kesehatan Masyarakat NasionaleJournal Ilmu Pemerintahan , 6(4): 39–50.
- Arif Citra Permana , Cahyo Sasmito , Cakti Indra Gunawan. 2018. “Program Keluarga Harapan Untuk Memutus Rantai Kemiskinan Di Kota Malang (Studi d i Kecamatan Lowokwaru Kota Malang).” 10(2): 64–74.
- Gunawan, Cakti Indra. 2018. “Implementasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Keluarga Harapan untuk Memutus Rantai Kemiskinan di Kota Malang (Studi di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang).” 10 (2): 64-74
- Pramata. Danies S. 2012. “Analisis Kesejahteraan Nelayan Di Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.” 5 (3): 55-64.

Suwondo, D. I., & Sutanto, E. M. 2015. Hubungan Lingkungan Kerja, Disiplin Kerja, Dan Kinerja Karyawan. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*. 17(2): 135–144.

Susanto, Herman. 2016. “*Evaluasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan.*” 9 (5): 85-99

Utomo, Dedy. 2014. “*Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi Pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri).*” *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya* 2(1): 29–34.

Skripsi

Astuti, Widy. A. 2012. *Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah Tahun 2009*. Semarang Universitas Negeri Semarang

Daldi, Jasri. 2018. *Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan XII Koro Kampar Kabupaten Kampar*. Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Euis, Sunarti. 2006. *Indikator Keluarga Sejahtera*. Sejarah Pengemabangan Evaluasi dan Berkelanjutan. Fakultas Ekologi Manusia. Institut Pertanian Bogor

Guswati, Sisca. 2016. *Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Pasir Peny. kabupaten indargiri hulu*. Ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas islam riau.

Pradana, Febri. 2018. *Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Aluran Beras Miskin (Raskin) Di Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar*. Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.

- Pratiwi, Vivi. 2018. *Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan*. Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
- Rambe, Armaini. 2011. *Alokasi Pengeluaran Rumah Tangga dan Tingkat Kesejahteraan (Kasus di Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara)*. Medan : Universitas Sumatera Utara
- Sunarti, Euis. 2012. *Kependudukan dan kesejahteraan keluarga (isu strategis dalam analisis dampak kependudukan terhadap aspek aocial economy)*. Fakuiltas ekologi manusia IPB Bogor.
- Yulia, Ranny. 2015. *Evaluasi Pelaksanaan Sekolah Gratis Bagi Keluarga Miskin Di Yayasan Ibnu Sina Maleo Bintaro*. Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Lampiran

Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 2018

Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 2020

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Peyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Kementrian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

إِجَامَعَةُ الْإِسْلَامِيَّةِ الرَّيَوِيَّةِ

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 1462/A-UIR/5-FS/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Nurhadijah
NPM : 177310870
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN HIDUP MASYARAKAT (STUDI DESA LAHANG TENGAH KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)
Persentase Plagiasi : 23 %
Jumlah Halaman : 113 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)
Status : Lulus

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 08 April 2021

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik



Indra Safri, S.Sos., M.Si
NPK. 970702230